

DOI <http://dx.doi.org/10.36722/sh.v11i2.5820>

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Menikah Siri pada Pekerja Migran Indonesia di Negara MN

Dea Utami^{1*}, Dini Permana Sari²

¹Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang,
Jl. Bandung No.1, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, 65113.

²Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Depok,
Jl. H. Maksu No. 23 Kel. Sawangan Baru, Kec. Sawangan, Jawa Barat, 16511.

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: deautami1202@gmail.com

Abstract – This study examines factors influencing the decision to enter an unregistered marriage (nikah siri) among Indonesian migrant workers in MN. The study uses a qualitative approach with semi-structured interviews involving five Indonesian migrant workers and thematic analysis. Findings show that the decision is shaped by administrative barriers, economic limitations, emotional needs, religious norms, and acceptance within migrant communities. These factors operate through attitude, subjective norms, and perceived behavioral control, making nikah siri appear to be the most feasible option in conditions of migration. The findings also indicate that limited access to documents, time, costs, and information reduces perceived control over formal marriage registration, while emotional support and social acceptance strengthen favorable attitudes toward nikah siri. The study concludes that the decision is not solely an individual choice but is influenced by vulnerable living conditions and limited access to legal and administrative resources. The findings support the need for accessible legal information, psychosocial support, and simpler marriage registration services for migrant workers.

Abstrak – Penelitian ini bertujuan memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan melakukan nikah siri pada pekerja migran Indonesia di MN. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur terhadap lima pekerja migran Indonesia dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan nikah siri dipengaruhi oleh hambatan administrasi, keterbatasan ekonomi, kebutuhan dukungan emosional, norma agama dan penerimaan komunitas migran. Faktor-faktor tersebut bekerja melalui sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku sehingga nikah siri dipandang sebagai pilihan yang paling memungkinkan dalam kondisi migrasi. Keterbatasan dokumen, waktu, biaya dan informasi menurunkan persepsi kontrol terhadap pencatatan perkawinan resmi. Sebaliknya, dukungan emosional dan penerimaan sosial memperkuat sikap positif terhadap nikah siri. Penelitian menyimpulkan bahwa keputusan tersebut bukan hanya pilihan individu, tetapi juga dipengaruhi kondisi hidup yang rentan serta keterbatasan akses terhadap sumber daya hukum dan administrasi. Temuan ini mendukung perlunya edukasi hukum yang mudah dipahami, pendampingan psikososial dan layanan pencatatan perkawinan yang lebih sederhana bagi pekerja migran.

Keywords - Migrant Workers, Perceived Social Support, Subjective Norms, Theory of Planned Behavior, Unregistered Marriage.

PENDAHULUAN

Nikah siri pada pekerja migran Indonesia perlu dipahami dalam konteks keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan administrasi. Kehidupan yang jauh dari keluarga, tuntutan

pekerjaan, serta hambatan dokumen dapat membuat pencatatan perkawinan terasa sulit dijangkau. Studi mengenai kebijakan pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat masih terjadi meskipun kedua negara memiliki ketentuan mengenai

pencatatan perkawinan (Warman et al., 2023). Penelitian mengenai kepastian hukum juga menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan berkaitan dengan perlindungan dan kepastian status hukum keluarga (Rosyadi & Kahar, 2023). Pada konteks migrasi, hambatan administratif juga dapat berhubungan dengan akses terhadap identitas dan layanan dasar bagi anggota keluarga yang terdampak migrasi (UNICEF Malaysia, 2023).

Penelitian terdahulu tentang perkawinan tidak tercatat lebih banyak menyoroti aspek hukum, penegakan aturan dan konsekuensi administrasi. Garfes (2022) menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik perkawinan tidak tercatat masih menghadapi berbagai kendala. Warman et al. (2023) juga menunjukkan bahwa masih terdapat praktik perkawinan tidak tercatat di Indonesia dan Malaysia serta perlunya perbaikan kebijakan pencatatan. Pada sisi lain, penelitian mengenai pekerja migran menunjukkan bahwa kondisi kerja dan lingkungan sosial dapat membentuk kerentanan psikologis, termasuk tekanan dan keterbatasan akses terhadap dukungan (Farwin et al., 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa keputusan melakukan nikah siri perlu dilihat tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai proses pengambilan keputusan yang berlangsung dalam kondisi sosial, ekonomi dan psikologis tertentu.

Keputusan untuk menikah merupakan proses yang dapat dipengaruhi oleh penilaian individu terhadap manfaat dan konsekuensi perilaku, pengaruh lingkungan sosial, serta kemampuan yang dirasakan untuk melaksanakan pilihan tersebut. Pada pekerja migran, rasa sepi, tekanan pekerjaan, kebutuhan akan dukungan emosional, serta keterbatasan akses terhadap prosedur perkawinan resmi dapat menjadi bagian dari konteks pengambilan keputusan. Penelitian yang secara khusus menghubungkan faktor-faktor tersebut dengan keputusan pekerja migran Indonesia melakukan nikah siri di MN masih terbatas. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang menjelaskan bagaimana pengalaman psikologis dan kondisi sosial berhubungan dengan penilaian pekerja migran terhadap nikah siri.

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai kerangka untuk memahami pengambilan keputusan melalui tiga komponen utama yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*) dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 2022; Hagger et al., 2022). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketiga komponen

tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan niat dan pengambilan keputusan dalam konteks sosial yang berbeda (Assfaw & Minaye, 2022). Perspektif psikologi perkembangan juga digunakan karena sebagian besar partisipan berada pada fase dewasa awal yang berkaitan dengan pembentukan relasi intim dan pencarian kestabilan hidup (Shulman, 2023). Penggunaan kedua perspektif tersebut membantu menjelaskan keputusan nikah siri sebagai hasil interaksi antara penilaian pribadi, pengaruh sosial dan kondisi yang dirasakan memungkinkan atau menghambat suatu perilaku.

Kebaruan penelitian ini pada penjelasan keputusan melakukan nikah siri melalui perspektif *Theory of Planned Behavior* dalam konteks pengalaman pekerja migran Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada terbentuknya sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku ketika partisipan menghadapi kebutuhan emosional, tekanan sosial, keterbatasan ekonomi, serta hambatan administrasi. Penelitian ini bertujuan memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan melakukan nikah siri pada pekerja migran Indonesia di MN melalui pengalaman psikologis, kondisi sosial dan konteks migrasi yang mereka hadapi.

METODE

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan desain deskriptif. Pemilihan desain tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yaitu memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan melakukan nikah siri berdasarkan pengalaman dan makna yang diberikan oleh pekerja migran terhadap situasi yang mereka hadapi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali proses pengambilan keputusan secara lebih mendalam sehingga berbagai faktor psikologis, sosial, ekonomi dan administratif dapat dipahami sesuai dengan pengalaman partisipan (Creswell & Poth, 2023).

Partisipan penelitian berjumlah lima orang pekerja migran Indonesia yang tinggal dan bekerja di MN. Partisipan terdiri atas tiga perempuan dan dua laki-laki dengan rentang usia 25–33 tahun. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih partisipan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria partisipan meliputi pekerja migran Indonesia yang telah tinggal di MN selama empat sampai tujuh tahun, memiliki pengalaman langsung atau kedekatan dengan praktik nikah siri, serta bersedia mengikuti seluruh rangkaian wawancara. Latar belakang pekerjaan partisipan mencakup

sektor informal, perdagangan kecil dan layanan rumah tangga.

Proses pengumpulan data berlangsung selama Januari hingga Februari 2026. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur melalui media daring menyesuaikan kondisi kerja partisipan. Setiap wawancara berlangsung sekitar 45–60 menit dan direkam setelah memperoleh persetujuan partisipan. Seluruh rekaman kemudian ditranskripsikan secara verbatim untuk memudahkan proses analisis. Pedoman wawancara disusun berdasarkan konsep *Theory of Planned Behavior* yang meliputi sikap terhadap nikah siri (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), tugas perkembangan dewasa awal, serta dampak keputusan terhadap kehidupan keluarga (Ajzen, 2022; Hagger et al., 2022; Shulman, 2023).

Analisis data menggunakan analisis tematik mengacu pada Braun dan Clarke (2021). Proses analisis diawali dengan membaca transkrip secara berulang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap isi wawancara. Tahap berikutnya dilakukan dengan memberikan kode awal pada data yang relevan, mengelompokkan kode menjadi tema sementara, menelaah kembali kesesuaian antar tema, menetapkan tema akhir, kemudian menyusun interpretasi berdasarkan hubungan antar tema. Analisis diarahkan pada tema yang berkaitan dengan sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku sehingga temuan dapat dibahas sesuai kerangka *Theory of Planned Behavior*.

Kredibilitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti juga menyusun catatan reflektif selama proses penelitian untuk mengurangi pengaruh pandangan pribadi terhadap interpretasi data (Braun & Clarke, 2021). Proses *member checking* dilakukan dengan meminta partisipan meninjau kembali ringkasan hasil wawancara guna memastikan kesesuaian makna dengan pengalaman yang mereka sampaikan. Aspek etika penelitian dipenuhi melalui pemberian penjelasan mengenai tujuan penelitian, persetujuan partisipan (*informed consent*), penyamaran identitas menggunakan kode partisipan, serta pemberian hak kepada partisipan untuk menghentikan wawancara kapan saja tanpa konsekuensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan melakukan nikah siri pada migran terbentuk melalui interaksi antara sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Lima partisipan menggambarkan situasi hidup yang ditandai oleh rasa sepi, tekanan kerja, keterbatasan biaya, dokumen, waktu dan pengaruh komunitas. Dalam hal memperjelas keterkaitan temuan dengan kerangka penelitian, hasil dan pembahasan disusun berdasarkan tiga komponen *Theory of Planned Behavior* serta konsekuensi dan implikasinya.

Sikap terhadap Nikah Siri

Temuan menunjukkan bahwa sikap terhadap nikah siri terbentuk terutama melalui kebutuhan akan kedekatan emosional, rasa aman dan pertimbangan praktis. Partisipan menggambarkan kehidupan migrasi sebagai kondisi yang dapat memunculkan kesepian dan kelelahan akibat ritme kerja. Dalam kondisi tersebut, pasangan dipandang sebagai sumber dukungan emosional dan stabilitas sehari-hari. Penilaian positif terhadap manfaat tersebut membuat nikah siri dipandang sebagai pilihan yang dapat segera memberikan kepastian relasi.

“Yang paling terasa adalah sepi dan capek. Jam kerja cukup panjang, jadi waktu untuk istirahat dan bersosialisasi juga terbatas. Dalam kondisi begitu, dukungan emosional dari pasangan terasa sangat penting.” (Narasumber 1).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Farwin et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pekerja migran berupah rendah dapat mengalami tekanan sosial dan psikologis yang berkaitan dengan kondisi kerja dan lingkungan hidup. Dalam penelitian ini, kebutuhan akan dukungan emosional menjadi bagian dari penilaian partisipan terhadap manfaat nikah siri. Dengan demikian, sikap terhadap nikah siri tidak hanya berkaitan dengan pertimbangan agama, tetapi juga dengan kebutuhan untuk memperoleh rasa aman dan dukungan dalam kehidupan migrasi.

“Dorongan emosional sangat besar. Saat hidup jauh dari rumah, rasa kesepian bisa membuat orang ingin segera punya pasangan yang memberi rasa aman. Kalau ditambah prosedur resmi yang rumit, pilihan nikah siri jadi terlihat masuk akal.” (Narasumber 3).

Norma Subjektif

Norma subjektif terlihat melalui pengaruh keluarga, teman dan tokoh agama serta penerimaan komunitas

migran. Dukungan lingkungan membuat nikah siri dipandang sebagai praktik yang dapat diterima secara moral dan sosial. Ketika orang-orang yang dianggap penting memberikan penerimaan, tekanan untuk mengikuti prosedur formal menjadi relatif lebih lemah. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan tidak berdiri sendiri, tetapi dibentuk oleh keyakinan partisipan mengenai pandangan lingkungan terhadap pilihan mereka.

“Alasan yang paling sering saya dengar adalah cepat, murah dan tidak terlalu ribet. Banyak orang ingin segera memberi status pada hubungan mereka. Karena itu, nikah siri dianggap sebagai jalan tengah.” (Narasumber 4).

Temuan tersebut memperkuat penjelasan *Theory of Planned Behavior* bahwa norma subjektif berkaitan dengan keyakinan individu mengenai harapan atau penerimaan orang lain terhadap suatu perilaku (Ajzen, 2022). Dalam konteks penelitian ini, penerimaan komunitas dapat mengurangi persepsi bahwa nikah siri merupakan pilihan yang menyimpang. Norma agama dan dukungan sosial kemudian berfungsi sebagai faktor yang memperkuat penerimaan terhadap keputusan tersebut.

Persepsi Kontrol Perilaku

Persepsi kontrol perilaku menjadi faktor penting ketika partisipan menilai pencatatan perkawinan resmi sebagai proses yang panjang, mahal, dan sulit dijangkau. Hambatan yang disebutkan meliputi dokumen, biaya, waktu, pengetahuan mengenai prosedur, serta kekhawatiran menghadapi administrasi setempat. Kondisi tersebut membuat kemampuan untuk melaksanakan perkawinan resmi dipersepsikan lebih rendah dibandingkan pilihan nikah siri.

“Hambatannya biasanya dokumen, waktu, dan biaya. Tidak semua orang paham prosedur yang harus diikuti. Ada juga yang takut repot berurusan dengan administrasi setempat.” (Narasumber 2).

Temuan ini didukung oleh Warman et al. (2023) yang menunjukkan bahwa perkawinan tidak tercatat di Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan persoalan implementasi kebijakan pencatatan. Rosyadi dan Kahar (2023) juga menunjukkan bahwa ketentuan pencatatan perkawinan masih menghadapi persoalan kepastian hukum. Pada konteks migrasi, UNICEF Malaysia (2023) menemukan bahwa hambatan struktural dan logistik dapat menjadi penghalang dalam proses registrasi.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa hambatan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memengaruhi persepsi partisipan mengenai kemampuan mereka untuk memilih perkawinan resmi. Studi terbaru mengenai layanan itsbat nikah bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia juga menunjukkan bahwa hambatan administratif dan kebutuhan pendampingan menjadi persoalan penting dalam akses terhadap pencatatan perkawinan (Purwati et al., 2026).

“Banyak orang bingung soal syarat, biaya dan alur yang harus diikuti. Ada juga yang takut salah karena tidak paham bahasa atau aturan setempat. Dalam situasi seperti itu, nikah siri terlihat lebih sederhana.” (Narasumber 5).

Integrasi Temuan dan Konsekuensi

Ketiga komponen *Theory of Planned Behavior* saling berhubungan dalam menjelaskan keputusan nikah siri. Sikap terbentuk ketika nikah siri dinilai mampu memberikan kedekatan emosional, rasa aman dan penyelesaian relasi yang lebih cepat. Norma subjektif memperkuat keputusan melalui penerimaan keluarga, tokoh agama, teman dan komunitas. Persepsi kontrol perilaku menjelaskan mengapa perkawinan resmi dipandang lebih sulit karena keterbatasan dokumen, biaya, waktu dan informasi. Pola tersebut menunjukkan bahwa nikah siri dipersepsikan sebagai pilihan yang paling memungkinkan ketika manfaat yang dirasakan lebih besar daripada hambatan yang dipersepsikan.

Relasi kuasa juga perlu diperhatikan dalam membaca temuan. Partisipan menggambarkan bahwa pihak yang memiliki posisi ekonomi atau dokumen lebih kuat cenderung lebih menentukan bentuk perkawinan yang dipilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku tidak selalu dimiliki secara seimbang oleh kedua pihak dalam pasangan. Pihak yang lebih rentan dapat memiliki ruang yang lebih kecil untuk menolak keputusan yang telah diarahkan sebelumnya.

Dilihat dari perspektif psikologi perkembangan, sebagian besar partisipan berada pada fase dewasa awal yang berkaitan dengan pencarian kestabilan hidup dan pembentukan relasi intim (Shulman, 2023). Situasi migrasi dapat memperkuat kebutuhan tersebut karena dukungan keluarga tidak selalu tersedia. Oleh karena itu, kebutuhan akan pasangan dan rasa aman dapat menjadi bagian dari sikap yang mendukung keputusan menikah, namun kebutuhan tersebut berinteraksi dengan norma sosial dan hambatan administratif sehingga keputusan yang

dihasilkan tidak dapat dipahami hanya sebagai pilihan individual.

Konsekuensi keputusan juga perlu menjadi bagian dari pembahasan. Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan persoalan kepastian status hukum dan administrasi keluarga. Rosyadi dan Kahar (2023) menekankan pentingnya pencatatan untuk kepastian hukum, sedangkan UNICEF Malaysia (2023) menunjukkan bahwa hambatan dokumentasi dapat berdampak pada akses identitas dan layanan dasar bagi anak yang terdampak migrasi. Temuan ini menunjukkan perlunya edukasi hukum yang sederhana, pendampingan psikososial, dan layanan pencatatan yang lebih mudah dijangkau oleh pekerja migran. Temuan mengenai identitas dan dokumentasi pada populasi terdampak migrasi juga menunjukkan pentingnya pencatatan peristiwa sipil untuk akses terhadap hak dan layanan dasar (Petcharamesree, 2023).

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah partisipan yang terbatas dan konteks penelitian yang berfokus pada pekerja migran Indonesia di MN. Variasi pengalaman berdasarkan jenis pekerjaan, status dokumen, lama tinggal dan kondisi keluarga belum dapat digambarkan secara penuh. Penelitian berikutnya dapat melibatkan partisipan yang lebih beragam dan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan keputusan menikah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan melakukan nikah siri pada pekerja migran Indonesia dipengaruhi oleh interaksi antara sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Sikap terbentuk melalui kebutuhan akan dukungan emosional, rasa aman dan pertimbangan praktis. Norma subjektif diperkuat oleh penerimaan keluarga, tokoh agama, teman dan komunitas migran. Persepsi kontrol perilaku dipengaruhi oleh keterbatasan dokumen, biaya, waktu, informasi dan kerumitan prosedur pencatatan perkawinan resmi. Interaksi ketiga komponen tersebut membuat nikah siri dipandang sebagai pilihan yang paling memungkinkan dalam kondisi migrasi tertentu. Temuan ini menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai pilihan pribadi, tetapi perlu dilihat dalam konteks kerentanan sosial, ekonomi, psikologis dan administratif.

Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan partisipan yang lebih beragam agar variasi pengalaman pekerja migran dapat digambarkan secara lebih lengkap. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antara sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan keputusan menikah. Secara praktis, edukasi hukum perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan disertai pendampingan administratif agar pekerja migran lebih memahami prosedur pencatatan perkawinan. Layanan psikososial juga penting untuk membantu pekerja migran menghadapi kesepian, tekanan kerja, dan kebutuhan dukungan emosional sebelum mengambil keputusan yang berdampak jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2022). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 4(2), 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>.
- Assfaw, A. K., & Minaye, A. (2022). Explaining migration intention from selected psycho-social variables in South Wollo, Ethiopia. *Frontiers in Sociology*, 7, Article 960203. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.960203>.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/thematic-analysis/book248481>.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Farwin, A., Low, A., Howard, N., & Yi, H. (2023). “My young life, finished already?”: A qualitative study of embedded social stressors and their effects on mental health of low-wage male migrant workers in Singapore. *Globalization and Health*, 19, Article 47. <https://doi.org/10.1186/s12992-023-00946-5>.
- Garfes, H. P. (2022). Law enforcement of unregistered marriage practices in Indonesia: Lawrence Meir Friedman's legal effective perspective. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(3), 515–538. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.515-538>.
- Hagger, M. S., Hamilton, K., & Montaña, D. (2022). Predicting health and social behavior using the theory of planned behavior: Recent advances and future directions. *Social and Personality*

- Psychology Compass, 16(6), e12697.
<https://doi.org/10.1111/spc3.12697>.
- Petcharamesree, S. (2023). Birth registration, legal identity and impacts on migration in ASEAN. In S. Petcharamesree & M. P. Capaldi (Eds.), *Migration in Southeast Asia* (pp. 39–56). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25748-3_3.
- Purwati, A., Ruslita, G., Yulia, A., Marina, L., & Batubara, S. C. (2026). Integrated itsbat nikah services for Indonesian migrant workers cross-border community service program at the Consulate General of the Republic of Indonesia Kuching, Malaysia. *International Journal of Community Service*, 6(1). <https://doi.org/10.51601/ijcs.v6i1.960>.
- Rosyadi, I., & Kahar, A. (2023). Analysis of legal certainty aspects in Indonesian marriage registration rule. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(3), 469–488.
<https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.469-488>.
- Shulman, S. (2023). *A new lens on emerging adulthood: Fluidity as the path to settling down*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190841836.001.0001>.
- UNICEF Malaysia. (2023). *For every child an identity: Challenges in birth registration for children affected by migration in Peninsular Malaysia*.
<https://www.unicef.org/malaysia/reports/every-child-identity>.
- Warman, A. B., Jafar, W. A., Asmara, M., Kirin, A. B., & Usmani, S. A. (2023). Reforming marriage registration policies in Malaysia and Indonesia. *BESTUUR*, 11(1).
<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/6632>.